

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Hubungan Masyarakat

1. Pengertian Hubungan Masyarakat

Menurut Kamus *Fund and Wagnel* dalam Zulkarnain, pengertian Humas adalah segenap kegiatan dan teknik/kiat yang digunakan organisasi atau individu untuk menciptakan atau memelihara suatu sikap dan tanggapan yang baik dari pihak luar terhadap keberadaan dan aktivitasnya.¹

Menurut Rex Harlow dalam Cutlip mengatakan “*public relations is the deliberate, planned and sustained effort to establish and maintain mutual understanding between an organization and its publics.*”² *Public relations* adalah memikirkan, merencanakan dan mencurahkan daya untuk membangun dan menjaga saling pengertian antara organisasi dan publiknya.

Sejalan dengan yang dikatakan Zulkarnain dalam kamus *Fund and Wagnel*, hubungan masyarakat dalam dunia pendidikan adalah serangkaian kegiatan organisasi untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara sekolah dan masyarakat .Hubungan yang harmonis itu

¹ Zulkarnain Nasution, *Manajemen Humas di Lembaga Pendidikan*, (Malang: UPT. Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, 2006), h. 12

² Scott M. Cutlip, et al., *EFFECTIVE PUBLIC RELATIONS Tenth Edition*, (New Jersey: PEARSON EDUCATION INC, 2009), h. 7

dapat ditandai dengan adanya saling pengertian, saling membantu, saling melengkapi, saling kerjasama antara sekolah dan masyarakat.³

Berdasarkan paparan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa Humas adalah kegiatan dari suatu organisasi untuk menciptakan hubungan yang harmonis kepada seluruh masyarakat. Khususnya Humas dalam sekolah inklusi untuk menciptakan hubungan yang harmonis kepada seluruh warga sekolah dan masyarakat. Disamping itu juga Humas sekolah inklusi untuk menciptakan gambaran ataupun pandangan yang positif tentang sekolahnya.

2. Tujuan Hubungan Masyarakat

Menurut Charles S. Steinberg dalam Abdurrachman tujuan PR adalah menciptakan opini publik yang favourable tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh badan yang bersangkutan.⁴

Elvinaro dan Soemirat menjelaskan bahwa, tujuan PR untuk mengembangkan pengertian dan kemauan baik (*goodwill*) publiknya serta untuk memperoleh opini publik yang menguntungkan atau untuk

³ Direktorat Tenaga Kependidikan, ***Manajemen Hubungan Sekolah dan Masyarakat dalam Pemberdayaan Masyarakat***, Bahan Pendidikan dan Pelatihan bagi Kepala Sekolah Pendidikan Dasar, (Jakarta: Ditjen PMPTK Depdiknas, 2007).

⁴ Oemi Abdurrachman, ***Dasar-Dasar Public Relations***, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), h. 6

menciptakan kerjasama berdasarkan hubungan yang harmonis dengan publik.⁵

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disintesisakan bahwa tujuan sebuah Humas adalah menciptakan dan memelihara saling pengertian, maksudnya adalah untuk memastikan bahwa organisasi tersebut senantiasa dimengerti oleh pihak lain yang berkepentingan. Dengan adanya kata 'saling' maka organisasi pun harus dapat memahami publiknya.

a. Pengertian Citra Positif

Menurut Downing dalam kitchen citra atau image adalah :

“A set of meanings by which an object is known and through which people describe, remember, and relate to it. That is the result of interaction of a person’s beliefs, ideas, feelings and impressions about an object.”

seperangkat arti dari sebuah objek yang telah dikenal dan di deskripsikan, mengingat dan mengaitkan hal tersebut. Merupakan hasil dari interaksi keyakinan seseorang, ide, perasaan, dan ketertarikan terhadap objek. Citra produk atau citra merek (brand image) adalah salah satu bagian dari citra.⁶

⁵ Drs. Elvinaro Ardianto, M.Si dan Drs. Soleh Soemirat, M.Si, **Dasar-dasar Public Relations**, (Bandung: Rosda Karya, 2008), h. 89

⁶ F. Rangkuti, **Analisis SWOT Teknik membedah Kasus Bisnis**, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009), h. 90

Citra dapat diartikan: (a)kata benda: gambar, rupa, gambaran; (b)gambar bukan oleh yang dimiliki orang banyak mengenai pribadi, perusahaan organisasi atau produk; (c)kesan mental atau tayangan visual yang ditimbulkan oleh sebuah kata, frase atau kalimat, dan merupakan unsur dasar yang khas dalam karya prosa atau puisi.

Canton dalam Ardianto menyatakan, Citra adalah kesan, perasaan, gambaran diri publik terhadap perusahaan yang dengan sengaja diciptakan dari suatu objek, orang atau organisasi

Berdasarkan beberapa pendapat ahli tentang citra diatas, dapat disimpulkan bahwa citra ialah merupakan sebuah kesan, perasaan, ataupun gambaran publik yang muncul terhadap suatu objek. Perusahaan, organisasi atau lembaga yang menikmati citra positif biasanya menemukan produk atau jasa mereka lebih mudah diterima dibandingkan produk atau jasa yang citranya kurang baik atau netral. Dalam penelitian ini SMPN 232 Jakarta Timur berusaha meningkatkan citra positif pendidikan inklusif dimata masyarakat.

b. Jenis Citra

Jeffkins dalam nurjaman dan umam menyatakan bahwa terdapat 5 jenis citra (image), yaitu:

- 1) Citra Bayangan (Mirror Image) citra anggota organisasi ataupun pemimpinnya mengenai anggapan pihak luar tentang organisasinya.

- 2) Citra yang Berlaku (Current Image), yaitu suatu citra atau pandangan yang dianut oleh pihak-pihak luar mengenai suatu organisasi
- 3) Citra Perusahaan (Corporate Image) Citra organisasi secara keseluruhan, tidak hanya dari produk atau jasanya.
- 4) Citra Manjemuk (Multiple Image) jumlah pegawai atau cabang dari suatu perusahaan dapat menimbulkan citra yang belum tentu sama dengan organisasi atau perusahaan tersebut secara keseluruhan.
- 5) Citra Yang Diharapkan (Wish Image). Citra harapan adalah suatu citra yang diinginkan oleh pihak manajemen atau suatu organisasi. Citra yang diharapkan biasanya dirumuskan dan diterapkan untuk sesuatu yang relatif baru, ketika khalayak belum memiliki informasi yang memadai mengenainya.

3. Peran dan Fungsi Humas pada Lembaga Pendidikan

a. Peran Humas

Pada dasarnya peran Humas atau *Public Relations* adalah mengetahui serta menilai sikap publik agar tercipta keserasian antara masyarakat dan kebijaksanaan lembaga atau institusi khususnya yang bergerak di bidang pendidikan. Karena aktivitas yang dilakukan oleh Humas mulai dari program Humas, tujuan, dan sampai sasaran yang akan dicapai oleh suatu lembaga pendidikan tidak akan terlepas dari dukungan dan kepercayaan citra positif yang dibentuk dari pihak public atau masyarakatnya.

Humas juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan berorganisasi, karena hidup matinya sebuah perusahaan atau organisasi tergantung terhadap peranan humas. Hal ini tak lepas dari kegiatan yang mereka lakukan berhubungan langsung dengan seluruh

publik lembaga pendidikan, dan pada dasarnya keberadaan sebuah lembaga pendidikan amatlah tergantung pada publik. Jika seorang humas dapat menciptakan suasana yang harmonis, saling kepercayaan antara pihak lembaga dan publik maka humas tersebut telah melaksanakan peran dan fungsinya dengan baik.

Seperti yang disampaikan oleh Zulkarnain dalam bukunya, peran humas di lembaga pendidikan kedepan antara lain:

- a. Membina hubungan harmonis kepada publik intern (dalam lingkungan lembag pendidikan, seperti: dosen/guru, tenaga administrasi, dan siswa), dan hubungan kepada publik ekstern (di luar lembaga pendidikan, seperti: orang tua siswa, dan diluar lembaga pendidikan).
- b. Membina komunikasi dua arah antara publik internal (dosen/guru, karyawan, dan mahasiswa/siswa), dan publik eksternal (lembaga luar/instansi, masyarakat, dan media massa) dengan menyebarkan pesan, informasi dan publikasi hasil penelitian, dan berbagai kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan pimpinan.
- c. Mengidentifikasi dan menganalisis suatu opini atau berbagai persoalan, baik yang ada di lembaga pendidikan maupun yang ada di masyarakat.
- d. Berkemampuan mendengar keinginan atau aspirasi-aspirasi yang terdapat di dalam masyarakat.
- e. Bersikap terampil dalam menterjemahkan kebijakan-kebijakan pimpinan dengan baik.⁷

Sekarang ini, keahlian spesialis PR dan yang lainnya telah dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan program yang lebih luas dan canggih. Abad Digital dan Globalisasi memaksa serikat pekerja untuk menggunakan PR secara lebih baik untuk memobilisasi anggotanya,

⁷ Zulkarnain Nasution, *op.cit.*, h. 30

menyampaikan berita, dan meraih dukungan publik. Tim manajemen humas kini menggunakan riset dan Internet bersama alat-alat tradisional lain seperti hubungan media, *newsletter*, yang lebih maju, dan pengumuman pelayanan publik. Jajak pendapat baru-baru ini menunjukkan bahwa usaha serikat buruh untuk melakukan advokasi atas nama pekerja telah memberikan hasil.⁸

Humas mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan, khususnya dalam kehidupan organisasi, karena hidup matinya sebuah perusahaan atau organisasi tergantung terhadap peranan humas. Hal ini tak lepas dari kegiatan yang mereka lakukan berhubungan langsung dengan seluruh publik perusahaan/ organisasi, dan pada dasarnya keberadaan sebuah perusahaan/organisasi amatlah tergantung pada publik. Jika seorang humas dapat menciptakan suasana yang harmonis, saling kepercayaan antara pihak perusahaan dan publik maka humas tersebut telah melaksanakan peran dan fungsinya dengan baik.

b. Fungsi Humas

Sebuah lembaga pendidikan dapat mengantisipasi berbagai persoalan global, khususnya dalam mengantisipasi masalah opini negatif

⁸ Scott M. Cutlip, Allen H. Center, Glen M. Broom, *op.cit.*, hh. 531-532

terhadap suatu lembaga pendidikan diperlukannya fungsi Humas sebagai alat manajemen pada suatu lembaga pendidikan.

Menurut Zulkarnain dalam bukunya fungsi-fungsi Humas dalam kegiatan pada lembaga pendidikan antara lain:

- 1) Mampu sebagai mediator dalam menyampaikan komunikasi secara langsung (komunikasi tatap muka) dan tidak langsung (melalui media pers) kepada pimpinan lembaga dan publik intern (guru, karyawan, dan siswa/i).
- 2) Mendukung dan menunjang kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan mempublikasikan lembaga pendidikan. Dalam hal ini Humas bertindak sebagai pengelola informasi kepada publik intern dan publik ekstern, seperti: menyampaikan informasi kepada pers dan promosi.
- 3) Menciptakan suatu citra yang positif terhadap lembaga pendidikannya.⁹

Selaras dengan zulkarnain, I Gusti dalam Rosady menyatakan, seorang praktisi PR harus berkembang menjadi manajer yang memiliki kemampuan “manajerial” (Managerial Skill) atau *public relations manager*. Dan yang memiliki “kemampuan teknis” dalam berkomunikasi. Bahkan mungkin kedua model praktisi PR profesional tersebut harus dikuasai sekaligus oleh praktisi PR bersangkutan dalam melaksanakan fungsinya pada aktivitas dan operasional manajemen organisasi.¹⁰

Sedangkan menurut Rumanti pada dasarnya fungsi PR adalah:

- 1) Kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh goodwill, kepercayaan, saling adanya pengertian dan citra yang baik dari publik.

⁹ Zulkarnain Nasution, *op.cit.*, h. 28

¹⁰ Rosady Ruslan, S.H., M.M., *op.cit.*, h. 19

- 2) Memiliki sasaran untuk menciptakan opini publik yang bisa diterima dan menguntungkan semua pihak.
- 3) Unsur penting dalam manajemen guna mencapai tujuan yang spesifik, sesuai harapan publik, tetapi merupakan kekhasan organisasi atau perusahaan. Sangat penting bagaimana organisasi *memiliki* warna, budaya, citra, dan suasana yang kondusif, peningkatan kinerja dan produktivitas bisa dicapai secara optimal.

Upaya menciptakan hubungan yang harmonis antara organisasi atau perusahaan dengan publiknya, internal atau eksternal melalui proses timbal balik, sekaligus menciptakan opini publik sebagai efeknya, yang sangat berguna sebagai input bagi organisasi yang bersangkutan.¹¹

Fungsi-fungsi utama yang dilakukan oleh seorang humas dalam organisasinya meliputi berbagai bidang dan segi. Dibawah ini terdapat beberapa fungsi humas yang paling utama, diantaranya, (1) menumbuhkan dan mengembangkan hubungan baik antara lembaga/organisasi dengan publiknya baik publik intern maupun extern dalam rangka menanamkan pengertian, (2) menilai dan menentukan pendapat umum yang berkaitan dengan organisasinya, (3) memberi saran kepada pemimpin tentang cara-cara mengendalikan pendapat umum sebagaimana mestinya, (4) menumbuhkan motivasi dan partisipasi publik dalam rangka menciptakan iklim pendapat publik yang menguntungkan organisasi/lembaga, dan (5) menggunakan komunikasi untuk mempengaruhi pendapat umum.

¹¹ Sr. Maria Assumpta Rumanti, ***Dasar-dasar Public Relations : Teori dan Praktik***, (Jakarta: Grasindo, 2009) h. 32

4. Ruang Lingkup Humas

Menurut Morissan dalam bukunya mengatakan, ruang lingkup pekerjaan Humas dapat dibagi menjadi enam bidang pekerjaan, yaitu:

- a. **Publisitas**
Salah satu kegiatan Humas adalah publisitas, yaitu kegiatan menempatkan berita mengenai seseorang, organisasi atau perusahaan di media massa. Dengan kata lain, publisitas adalah upaya orang atau organisasi agar kegiatannya diberitakan media massa.
- b. **Pemasaran**
Tujuan Humas dalam pemasaran ini adalah untuk menyampaikan pesan kepada khalayak yang bukan menjadi pelanggan (*customer*) dari perusahaan tempat Humas itu berada. Perusahaan memasang iklan jika merasa pandangan perusahaan terhadap suatu isu tidak diberitakan secara proporsional atau jika perusahaan merasa public tidak memahami isu yang berkembang.
- c. **Public Affairs**
Organisasi atau perusahaan harus menjalin hubungan yang harmonis dengan pemerintah karena pemerintah mengeluarkan peraturan yang harus dipatuhi oleh perusahaan. *Public affairs* bertugas untuk memengaruhi kebijakan public yang dapat mendukung tujuan perusahaan.
- d. **Manajemen Isu**
Manajemen isu (*issues management*) merupakan upaya organisasi atau perusahaan untuk melihat kecenderungan isu atau opini public yang muncul di tengah masyarakat dalam upaya organisasi atau perusahaan untuk memberikan tanggapan atau respon yang sebaik-baiknya.
- e. **Lobi**
Organisasi bisnis di Negara maju seperti Amerika Serikat sudah lazim menunjuk suatu tim Humas untuk melakukan pendekatan atau lobi (*lobbying*) dengan lembaga-lembaga yang bertanggung jawab terhadap pembentukan hukum undang-undang baru dengan harapan undang-undang baru yang akan dikeluarkan itu tidak akan merugikan organisasi bersangkutan.
- f. **Hubungan Investor**
Tugas hubungan investor sangat sering berkaitan dengan masalah keuangan sehingga bidang ini sering pula disebut

dengan *financial relations*. Penyebaran informasi yang memengaruhi pengertian pemegang saham dan investor secara umum mengenai posisi keuangan dan prospek perusahaan, dan termasuk pula dalam tujuan *financial relations* adalah perbaikan hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham.¹²

Sedangkan Rosady menjelaskan dalam bukunya, ruang lingkup tugas PR dalam sebuah organisasi/lembaga antara lain meliputi aktivitas:

- a. Membina hubungan ke dalam (public internal)
Yang dimaksud dengan public internal adalah public yang menjadi bagian dari unit/badan/perusahaan atau organisasi itu sendiri. Seorang PR harus mampu mengidentifikasi atau mengenali hal-hal yang menimbulkan gambaran negative di dalam masyarakat, sebelum kebijakan itu dijalankan oleh organisasi
- b. Membina hubungan keluar (public eksternal)
Yang dimaksud public eksternal adalah public umum (masyarakat). Mengusahakan tumbuhnya sikap dan gambaran public yang positif terhadap lembaga yang diwakilinya.¹³

B. Hakikat Pendidikan Inklusi

1. Pengertian Pendidikan Inklusi

Pendidikan inklusi adalah salah satu yang paling penting, namun sulit dipahami, konsep ini muncul di Inggris dan internasional dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini adalah konsep yang penting karena, dalam penafsiran penuh, ini merupakan pergeseran yang berpotensi besar dari kebijakan dan praktek berdasarkan pilihan sesuai dengan persepsi tentang kemampuan, yang secara tradisional sanksi

¹² *Ibid.*, h. 30

¹³ Rosady Ruslan, S.H., M.M., *Op.Cit.*, h. 28

mengesampingkan banyak peserta didik dari pendidikan kebanyakan. Pendidikan inklusi bersandar pada keyakinan bahwa semua anggota masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam, dan memiliki akses ke pendidikan atas dasar kesetaraan. Namun, konsep yang sulit dipahami karena merupakan subjek dari banyak interpretasi yang berbeda, tergantung pada siapa yang menggunakan istilah, dalam konteks apa, dan untuk apa tujuannya.¹⁴

John Salvia dalam bukunya mengartikan pendidikan inklusi sebagai berikut, *“Inclusive education Education of people with and without disabilities in the same classes or school environments.”*¹⁵ Pendidikan inklusi adalah pendidikan orang dengan dan tanpa hambatan di dalam kelas atau lingkungan sekolah yang sama.

Dedi menjelaskan, pendidikan inklusif adalah sebuah konsep atau pendekatan pendidikan yang berusaha menjangkau semua orang tanpa kecuali.¹⁶

David Smith mengartikan pendidikan inklusi dapat berarti penerimaan anak-anak yang memiliki hambatan ke dalam kurikulum, lingkungan, interaksi sosial dan konsep diri (visi-misi) sekolah.

¹⁴ Gill Richards and Felicity Armstrong, ***Teaching and Learning in Diverse and Inclusive Classroom***, (Abingdon: Routledge, 2011), h. 7

¹⁵ John Salvia, et. al., ***Assessment In Special And Inclusive Education***, (USA: Wadsworth, 2010), h. 420

¹⁶ Berit H. Johnsen, Miriam D. Skjørten, ***Pendidikan Kebutuhan Khusus: Sebuah Pengantar***, terj. Susi Septaviana Rakhmawati, (Bandung: Prog. Pascasarjana UPI, 2004), h. 9

Berdasarkan pengertian konsep yang telah diuraikan oleh beberapa ahli diatas. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan inklusi adalah pendidikan yang menggabungkan anak yang memiliki kebutuhan khusus kedalam kelas atau sekolah, memiliki kurikulum, lingkungan, interaksi sosial maupun visi dan misi sekolah yang dipersatukan secara bersamaan tanpa harus memandang suatu keterbatasan peserta didik.

2. Landasan Pendidikan Inklusi

Implementasi konsep pendidikan inklusif di Indonesia didasari oleh empat landasan. Berdasarkan tiga landasan tersebut, yaitu landasan filosofi, landasan yuridis, dan landasan pedagogis. Berikut penjelasan lebih mendalam terkait dengan landasan pendidikan inklusi, adalah sebagai berikut:

a. Landasan Filosofis

Menurut Wahyu dalam bukunya, landasan filosofis yang mendorong adanya penyelenggaraan pendidikan inklusi adalah Bhinneka Tunggal Ika meyakini bahwa didalam diri manusia bersemayam potensi kemanusiaan yang bila dikembangkan melalui pendidikan yang baik dan benar dapat berkembang hingga hampir tak terbatas. Bertolak dari perbedaan antar manusia filosofi ini meyakini adanya potensi unggul tersembunyi yang bersemayam dalam diri tiap individu apabila

dikembangkan secara optimal dan terintegrasi dengan semua potensi kemanusiaan lainnya dapat menghasilkan suatu kinerja profesional.¹⁷

b. Landasan yuridis

Landasan yuridis Internasional bermula dari dikembangkannya perspektif pendidikan yang lebih inklusif. *Zeitgeist* ini paralel dengan populernya isu-isu hak-hak asasi manusia (*human rights*), hak-hak anak (*children's right*), gerakan pro-kemanusiaan, dan sejenisnya. Dalam dunia pendidikan khususnya, pendidikan yang memihak kepada semua orang itu dinyatakan oleh UNESCO dalam deklarasi tentang Pendidikan untuk Semua (*Education for All*) di Jomtien, Thailand tahun 1990. Deklarasi ini kemudian diperkuat lagi dalam Deklarasi Salamanca (1994) dan Dakkar (2000).¹⁸

Deklarasi Salamanca yang diselenggarakan di Spanyol oleh UNESCO melahirkan beberapa kesepakatan, kesepakatan tersebut menetapkan agar:¹⁹

- 1) Memberi hak kepada setiap anak untuk mendapatkan pendidikan di sekolah, termasuk anak yang membutuhkan layanan pendidikan khusus, baik kontemporer maupun permanen.
- 2) Memberi hak kepada setiap anak untuk masuk sekolah yang berada di lingkungan komunitas mereka dalam kelas-kelas inklusif.

17 Wahyu Sri Ambar, *op.cit.*, h. 109

18 Berit H. Johnsen, Miriam D. Skjørten, *op.cit.*, h. 9

19 Wahyu Sri Ambar, *op.cit.*, h. 124

- 3) Dipercayai bahwa pendidikan inklusif pada gilirannya akan membentuk satu masyarakat yang inklusif.

Di Indonesia sendiri penerapan pendidikan inklusif ini dijamin oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Bunyi dari pada Undang-undang tersebut ialah penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik berkelainan atau berupa sekolah khusus. Teknis penyelenggaraannya tentunya akan diatur dalam bentuk peraturan operasional.²⁰

c. Landasan pedagogis

Landasan pedagogis konsep pendidikan inklusif di Indonesia didasari oleh Pasal 3 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003. Tujuan pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkhak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.²¹

d. Landasan Empiris

Beberapa penelitian kemudian melakukan metaanalisis (analisis lanjut) atas hasil banyak penelitian sejenis. Hasil analisis yang dilakukan oleh Carlberg dan kavale terhadap 50 buah penelitian, Wang dan Baker

20 Direktorat Pendidikan Luar Biasa, *op.cit.*, h. 13

21 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, h. 3

terhadap 11 buah penelitian, dan Baker terhadap 13 buah penelitian menunjukkan bahwa pendidikan inklusif berdampak positif, baik terhadap perkembangan akademik maupun sosial anak berkelainan dan teman sebayanya.²²

3. Tujuan Pendidikan Inklusi

Tujuan dari pendidikan inklusi adalah dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945. Khususnya pasal 32 ayat 1 yang berbunyi 'setiap warga negara berhak mendapat pendidikan', dan ayat 2 yang berbunyi 'setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya'.²³

Hal itu didukung oleh UU no. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Khususnya pasal 5 ayat 1 yang berbunyi 'setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu'. UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak. Yang tertuang pada pasal 51 yang berbunyi 'anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.

²² Direktorat Pendidikan Luar Biasa, *op.cit.*, h.16

²³ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

4. Model Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi

Penempatan anak berkelainan di sekolah inklusi dapat dilakukan dengan model sebagai berikut:

- a. Kelas reguler (inklusi sepenuhnya).
model ini memungkinkan anak berkebutuhan belajar bersama dengan anak lainnya sepanjang hari di kelas reguler dengan kurikulum yang sama.
- b. Kelas reguler dengan *cluster*
kelas reguler dengan *cluster* memungkinkan anak belajar bersama di kelas dalam kelompok khusus.
- c. Kelas reguler dengan *pull out*
Kelas reguler dengan *pull out* model ini memungkinkan anak berkebutuhan belajar dengan anak lainnya namun dalam waktu tertentu ditarik untuk belajar dengan guru pembimbing khusus.
- d. Kelas reguler dengan *cluster* dan *pull out*.
Kelas reguler dengan *cluster* dan *pull out* model ini memungkinkan anak yang memiliki kebutuhan bersama anak lainnya dalam kelompok khusus dan dalam waktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke ruang sumber untuk belajar dengan guru pembimbing khusus.
- e. Kelas khusus dengan beberapa pengintegrasian
model kelas khusus dengan beberapa pengintegrasian memungkinkan anak berkebutuhan dan anak reguler dalam satu kelas, namun dalam bidang-bidang tertentu dapat belajar bersama anak lain di kelas reguler.
- f. Kelas khusus penuh.
Model inklusi dengan kelas khusus penuh memungkinkan anak berkebutuhan khusus belajar di kelas khusus yang berada pada sekolah reguler.²⁴

Model sekolah penyelenggara pendidikan inklusi di Indonesia sangat variatif dan bermacam-macam. Berdasarkan keseluruhan model kelas inklusi tersebut sekolah bebas menentukan apa yang akan mereka

²⁴ Direktorat Pendidikan Luar Biasa, op.cit., hh. 25-26

aplikasikan di sekolah masing-masing. Tentunya dilihat dari kebutuhan dan karakteristik yang mereka miliki.

C. Hasil Penelitian yang Relevan

Pada bagian ini akan dikemukakan hasil penelitian yang memiliki relevansi dan kesamaan kajian mengenai Manajemen Hubungan Masyarakat. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Novita Anggraini, dalam skripsinya yang berjudul Strategi manajemen humas dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah di SLTP Nusantara Plus Ciputat.²⁵ Dalam pelaksanaan manajemen humas pada sekolah dirasakan sangat penting keberadaannya, sebab humas bertujuan mengembangkan image atau citra yang baik dari sebuah lembaga pendidikan agar mendapatkan pengertian dan penerimaan yang baik dari publik. Oleh sebab itu, akan terlihat sekali perbedaan kualitas antara sekolah yang memiliki manajemen humas dan sekolah yang tidak memiliki manajemen humas.

Efektifitas manajemen humas pada sekolah tersebut berdasarkan persepsi siswa. Berdasarkan aspek-aspek yang dapat diukur meliputi pengembangan sarana-prasarana sekolah. Diantaranya ialah

²⁵ Novita Anggraini, dalam skripsi berjudul: **Strategi manajemen humas dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah di SLTP Nusantara Plus Ciputat** (<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/19141>), diakses pada tanggal 28 Februari 2015 pukul 00:14 WIB

penempatan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang berkompoten, mengadakan pentas seni yang dapat mengembangkan kreativitas siswa, mengembangkan program pembelajaran yang inovatif, serta menjaga hubungan yang harmonis antara sekolah dan masyarakat sekitar sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan strategi manajemen humas dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah.

Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini bahwa peran manajemen humas dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah yang selama ini dilaksanakan di SMP Nusantara Plus Ciputat berlangsung secara efektif. Hal tersebut dapat dijelaskan dari beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan.

Kedua, penelitian dilakukan oleh Andreas Wato. Dalam tesisnya yang berjudul *Manajemen Hubungan Masyarakat pada Sekolah Inklusi. Studi Multi Kasus pada SMPN 18 dan SMPK Bhakti Luhur Malang*.²⁶ Dari hasil penelitian ditemukan bahwa (1) Perencanaan program humas pada sekolah inklusi dimulai dari identifikasi permasalahan baik melalui pengamatan pribadi para praktisi hubungan masyarakat terhadap fenomena sehari-hari maupun masukan pihak yang berkepentingan

²⁶ Andreas Wato, dalam tesis berjudul: **Manajemen Hubungan Masyarakat pada Sekolah Inklusi. Studi Multi Kasus pada SMPN 18 dan SMPK Bhakti Luhur Malang** (<http://karya-ilmiah.um.ac.id/index.php/disertasi/article/view/8031>), diakses pada tanggal 28 Ferbruari 2015 pukul 00:28

tentang harapan dan kebutuhan para orangtua. Selanjutnya, dirumuskan tujuan dari program humas tersebut. Tujuan humas pada sekolah inklusi adalah agar masyarakat bisa menerima kehadiran siswa ABK dan pendidikan inklusi. Setelah tujuan kegiatan hubungan masyarakat dirumuskan, sekolah mengadakan rapat untuk menentukan strategi yang tepat untuk menjawab permasalahan. Setelah itu disusunlah program kerja.

(2) Pelaksanaan program hubungan masyarakat dalam sekolah inklusi dilakukan dengan menjalin komunikasi dua arah simetris yang baik dan rutin dengan pihak yang berkepentingan dengan mengedepankan sikap yang ramah dan menggunakan berbagai media, membentuk Pokja sekolah inklusi, melibatkan masyarakat dalam penyelenggaraan sekolah, memberikan dukungan dan motivasi kepada para praktisi hubungan masyarakat dengan pendekatan moral religius humanis, melakukan koordinasi melalui rapat triwulan.

(3) Evaluasi program hubungan masyarakat dalam pendidikan inklusi meliputi aktivitas pengawasan yang dilakukan oleh kepala sekolah dan manajer inklusi serta koordinator GPK, serta pengawasan non formal oleh orang tua dan semua personil sekolah. Evaluasi dilakukan secara individual nonformal dan formal dalam pleno atau rapat bersama pada tengah dan akhir semester serta akhir tahun ajaran. Salah satu pendekatan penting yang dilakukan dalam mekanisme evaluasi adalah dengan menggunakan pendekatan rohani.

Berangkat dari temuan penelitian ini, peneliti memberikan beberapa saran berikut. Mengingat sebagian besar masyarakat masih menolak dan belum mengenal dengan baik seluk beluk siswa berkebutuhan khusus dan pendidikan inklusi, Dinas Pendidikan kota Malang perlu terlibat dan memberikan perhatian khusus pada pelaksanaan dan sosialisasi siswa berkebutuhan khusus dan pendidikan inklusi khususnya pada sekolah-sekolah reguler atau konvensional yang sudah ada. Untuk menetapkan atau menyetujui apakah sebuah sekolah sudah layak membuka program inklusi, Dinas Pendidikan perlu memperhatikan segala bentuk persiapan penyelenggaraannya agar dapat sekolah inklusi melayani siswa dan masyarakat dengan baik. Berkaitan dengan pelaksanaan program hubungan masyarakat, pihak SMPN 18 dan SMPK Bhakti Luhur perlu terus membuka diri dan memelihara komunikasi dua arah yang simetris dengan stakeholders, terutama pada sekolah-sekolah jenjang pendidikan menengah pertama dan menengah atas atau yang sederajat serta. Hal ini dimaksudkan agar semua pihak merasa terdorong menerima, mendukung dan bahkan menyelenggarakan program inklusi. Tentunya, dalam menjalankan tugas kehumasan ini, para praktisi perlu menggunakan pendekatan moral religius dan menunjukkan berbagai bukti melalui para alumni yang sudah berhasil untuk memotivasi pihak yang berkepentingan agar mau menerima kehadiran siswa ABK dan pendidikan inklusi. Orangtua sebaiknya tidak merasa malu atau

minder menyekolahkan anaknya melainkan secara terbuka perlu menerima kehadiran anak berkebutuhan khusus serta mencari informasi mengenai bagaimana berhadapan dengan anak berkebutuhan khusus pada sekolah inklusi yang sudah ada karena justru di sanalah berbagai informasi tentang anak berkebutuhan khusus ditemukan dan anak-anak dapat belajar untuk hidup dalam masyarakat yang sesungguhnya bahwa di dalam masyarakat ada warga yang normal ada yang memiliki kebutuhan khusus. Mengingat penelitian dalam kaitan dengan substansi manajemen pendidikan inklusi masih sebatas manajemen kurikulum dan humasnya, maka disarankan agar peneliti lain perlu melakukan penelitian secara lebih mendalam dalam kedua substansi manajemen tersebut atau dalam substansi manajemen lainnya yang belum diteliti sebagai sumber informasi bagi sekolah lain di kota Malang yang ingin membuka program inklusi pada satuan pendidikannya.